

Peran Kebijakan Pendidikan dalam Memperluas Mobilitas Sosial Masyarakat Melalui Penguatan Pemerataan dan Dukungan Pembelajaran

Ira Yuliawati¹, Susan Hadianti², Jesica Berlian RN³, Iqbal Rizky Fauzan⁴,
Kariswa Aisyah⁵

^{1,2,3,4,5}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Majalengka
*irayuliawati62@gmail.com

ABSTRACT

Efforts to expand access and enhance the quality of education have become key priorities in Indonesia's attempt to promote social mobility across different socio-economic groups. This study examines how national education policies particularly those related to infrastructure improvement, digital learning expansion, and financial assistance contribute to improving educational equity and supporting upward mobility. Using a qualitative descriptive design, this research incorporates a literature review and content analysis of updated policy documents, government reports, international publications, and recent news on the implementation of education programs. The findings show that initiatives to equalize access, such as constructing schools in remote areas, distributing digital learning tools, and providing financial support through scholarship schemes, have broadened educational participation among marginalized communities. Moreover, programs aimed at improving teacher competence and upgrading learning facilities have strengthened learning outcomes and reduced disparities between regions. Despite these gains, challenges remain, including uneven resource distribution, gaps in digital infrastructure, and inconsistent implementation across districts. The study concludes that education policies can significantly promote social mobility when supported by inclusive planning, consistent monitoring, and targeted interventions for disadvantaged regions. Strengthening these components is essential to ensuring that educational transformation contributes meaningfully to long-term socio-economic equality.

Keywords: Education Policy; Equality of Access; Inclusive Education; Learning Support; Social Mobility

ABSTRAK

Indonesia menjadikan upaya perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas utama dalam mendorong mobilitas sosial di berbagai strata sosioekonomi. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana kebijakan pendidikan nasional terutama yang melibatkan pengembangan infrastruktur, ekspansi pembelajaran daring, dan dukungan finansial pendidikan berperan dalam menciptakan kesetaraan peluang belajar serta meningkatkan mobilitas sosial. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan tinjauan literatur dan analisis konten terhadap dokumen kebijakan mutakhir, laporan pemerintah, publikasi internasional, serta berita terkini mengenai pelaksanaan program pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah kesetaraan, seperti pembangunan sekolah di wilayah terpencil, penyaluran perangkat belajar digital, dan penyediaan bantuan keuangan melalui berbagai skema beasiswa, telah meningkatkan partisipasi pendidikan bagi kelompok marginal. Selain itu, program penguatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan fasilitas belajar turut memperbaiki hasil pembelajaran serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih muncul, termasuk ketidakmerataan sarana pendidikan, keterbatasan infrastruktur digital, serta penerapan kebijakan yang belum merata di seluruh daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki potensi besar untuk mendorong mobilitas sosial apabila didukung oleh perencanaan inklusif, pemantauan berkala, dan intervensi khusus di wilayah tertinggal. Penguatan aspek-aspek ini penting untuk memastikan bahwa transformasi pendidikan benar-benar berkontribusi pada kesetaraan sosial-ekonomi dalam jangka panjang.

Kata-kata Kunci: Dukungan Belajar; Kebijakan Pendidikan; Mobilitas Sosial; Pemerataan Akses; Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan taraf hidup dan memperbesar kesempatan mobilitas sosial bagi masyarakat. Dalam perspektif teori modal manusia kontemporer, pendidikan dipahami sebagai investasi strategis yang meningkatkan kemampuan kognitif, produktivitas, dan daya saing individu di pasar kerja modern (Hanushek & Woessmann, 2021). Melalui proses pendidikan, seseorang dapat mengumpulkan bekal pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi untuk naiknya status sosial-ekonomi. Seperti yang didukung oleh Bukodi dan Goldthorpe (2018), pendidikan berfungsi sebagai salah satu faktor penentu utama mobilitas sosial, karena menyediakan jalur meritokrasi yang memungkinkan individu dari berbagai asal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, penyamaan akses dan standar pendidikan menjadi elemen penting agar setiap warga negara mendapat peluang yang sama untuk maju.

Pandangan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam mobilitas sosial juga diperkuat oleh berbagai ahli di bidang ekonomi, sosiologi, dan pendidikan. Gary S. Becker melalui teori modal manusia menegaskan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan peluang ekonomi individu, sehingga berperan penting dalam peningkatan status sosial. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan individu memperoleh keterampilan dan kompetensi yang dihargai di pasar kerja, sehingga membuka peluang mobilitas sosial ke atas.

Namun, di Indonesia, perbedaan akses dan kualitas pendidikan masih menimbulkan masalah serius. Laporan dari Badan Pusat Statistik (2023) mengungkapkan adanya kesenjangan yang mencolok dalam hal fasilitas sekolah, penyebaran tenaga pengajar, serta kondisi ruang belajar di berbagai wilayah. Kesenjangan ini secara langsung memengaruhi perbedaan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Hal ini menjelaskan bahwa perbedaan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, khususnya di daerah terpencil, tetap menjadi rintangan besar bagi kesetaraan peluang belajar (Sari & Jasiah, 2025).

Lebih lanjut, studi lain menunjukkan bahwa kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital dan koneksi internet semakin memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan, terutama setelah meningkatnya pemanfaatan teknologi pembelajaran pascapandemi (Hendrastomo, 2023). Hal ini menandakan bahwa penyamaan fasilitas dan akses teknologi tidak terpisahkan dari usaha mencapai kesetaraan pendidikan. Selanjutnya, James S. Coleman menekankan pentingnya modal sosial dalam keberhasilan pendidikan. Ia berpendapat bahwa

hasil pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas dan kurikulum, tetapi juga oleh dukungan keluarga, jaringan sosial, serta lingkungan komunitas. Dalam konteks kebijakan pemerataan pendidikan, perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembelajaran dan mobilitas sosial.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan strategis. Salah satu langkah utama adalah program redistribusi guru aparatur sipil negara untuk mengurangi ketidakseimbangan penyebaran tenaga pendidik. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa wilayah 3T mendapatkan jumlah dan kualitas guru yang cukup. Langkah lainnya meliputi pengembangan infrastruktur digital, perbaikan bangunan sekolah, serta penguatan bantuan pembelajaran melalui program operasional pendidikan. Data pencapaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan akses pendidikan dan kondisi lingkungan belajar di sejumlah daerah (Ayudhia Nur Luthfia et al., 2023).

Meski demikian, keberhasilan berbagai kebijakan tersebut dalam mendorong mobilitas sosial masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak hanya tergantung pada perencanaan, tetapi juga pada keseragaman implementasi di lapangan serta kesesuaian dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran kebijakan pendidikan dalam memperluas mobilitas sosial melalui penguatan kesetaraan akses dan dukungan pembelajaran di Indonesia, dengan memanfaatkan data dan literatur ilmiah terkini.

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperluas peluang mobilitas sosial bagi masyarakat. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (Hanushek & Woessmann, 2008). Amartya Sen juga mendukung pendidikan sebagai sarana utama dalam memperluas kapabilitas individu. Pendidikan memungkinkan seseorang memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pendidikan yang merata dan berkualitas berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai sudut pandang teori sosial, pendidikan dipandang sebagai alat yang dapat memfasilitasi perubahan hidup individu, khususnya dengan meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Bukodi & Goldthorpe, 2018), pendidikan berperan sebagai salah satu penentu utama mobilitas sosial, karena menyediakan jalur meritokrasi yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan kesejahtraannya. Oleh karena itu, penyamaan

akses dan standar pendidikan merupakan elemen kunci agar setiap warga negara mendapat kesempatan yang setara untuk berkembang, tanpa mempertimbangkan asal usul sosial, ekonomi, geografis, atau budaya.

Namun di Indonesia, perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menimbulkan masalah besar. Laporan Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan adanya jurang yang jelas terkait fasilitas sekolah, distribusi tenaga pengajar, serta kondisi ruang belajar di berbagai daerah. Jurang ini secara langsung mempengaruhi variasi kualitas pembelajaran dan hasil siswa. Sekolah di daerah perkotaan, khususnya di wilayah dengan ekonomi maju, biasanya dilengkapi laboratorium, internet stabil, alat pembelajaran modern, serta lingkungan belajar yang kondusif. Di sisi lain, sekolah di pedesaan dan daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan ruang kelas, kurangnya sarana praktik, dan akses pembelajaran digital yang terbatas. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Nasywa dkk. (2023), yang menyatakan bahwa perbedaan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah terpencil, tetap menjadi hambatan utama bagi kesetaraan kesempatan belajar, meskipun berbagai program pemerataan pendidikan telah berjalan selama bertahun-tahun.

Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan bahwa kendala seperti infrastruktur digital yang terbatas dan koneksi internet yang buruk semakin memperparah jurang kualitas pendidikan, khususnya setelah peningkatan penggunaan teknologi pembelajaran pascapandemi (Hendrastomo, 2023). Menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran berbasis teknologi justru memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Temuan ini sejalan dengan teori kesenjangan digital yang dikemukakan oleh Van Deursen & Van Dijk (2019), yang menegaskan bahwa ketimpangan teknologi tidak hanya mencakup akses perangkat, tetapi juga kemampuan memanfaatkannya secara produktif.

Selama pandemi COVID-19, jarak pembelajaran yang jauh memaksa semua institusi pendidikan untuk mengadopsi teknologi sebagai alat belajar. Sekolah di daerah maju dapat beradaptasi dengan cepat berkat fasilitas seperti komputer, proyektor, platform digital, dan jaringan internet yang stabil (Falah & Hadna, 2022). 3T Sementara itu, sekolah di daerah tertinggal menghadapi hambatan besar akibat kurangnya perangkat teknologi, sinyal internet yang lemah, dan keterampilan digital yang rendah bagi guru dan siswa. Ketimpangan akses teknologi ini menciptakan “jurang pembelajaran” yang semakin melebar perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas dan akses teknologi tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai kesetaraan pendidikan, terutama di era transformasi digital.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa strategi kebijakan. Salah satu langkah utama adalah program redistribusi guru pegawai negeri sipil untuk mengurangi kecukupan distribusi tenaga pendidik. Menurut Kemdikbudristek (2024), kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) mempunyai jumlah dan kualitas guru yang memadai agar pembelajaran dapat berjalan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menekankan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam literasi digital, pedagogi aktif, dan manajemen pembelajaran berbasis siswa, sebagai cara memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Langkah lain yang diambil meliputi pemerintah pengembangan infrastruktur digital, perbaikan bangunan sekolah, penyediaan media pembelajaran, serta penguatan bantuan operasional melalui Program Operasional Pendidikan. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan memadai bagi siswa. Data pencapaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan akses pendidikan dan kondisi lingkungan belajar di beberapa daerah, yang terlihat dari bertambahnya sekolah yang diperbaiki, naiknya angka partisipasi sekolah, dan meluasnya penggunaan platform pembelajaran digital nasional (Kemdikbudristek, 2024). Di luar dukungan fasilitas, kebijakan pendidikan kini juga fokus pada transformasi kurikulum melalui Kurikulum Merdeka, yang memberikan ruang untuk diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan kondisi sekolah.

Meskipun demikian, keberhasilan berbagai kebijakan tersebut dalam mendorong mobilitas sosial masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada konsistensi implementasi di lapangan serta kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Tantangan seperti anggaran daerah yang terbatas, variasi kapasitas manajemen sekolah, serta penolakan terhadap perubahan kebijakan dapat mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, serta masyarakat agar kebijakan pemerataan pendidikan dapat berjalan optimal.

Selain aspek struktural dan kebijakan, budaya masyarakat terhadap pendidikan juga sangat mempengaruhi peluang mobilitas sosial. Di beberapa wilayah, terutama yang terpencil, pendidikan sering kali dianggap sebagai formalitas belaka, bukan sebagai investasi masa depan. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi keluarga untuk bekerja di usia sekolah, tingkat literasi orang tua yang rendah, serta kurangnya contoh akademik di lingkungan sosial dapat

menurunkan motivasi belajar siswa. Tantangan budaya ini perlu diatasi melalui pendekatan persuasif, sosialisasi pentingnya pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat agar pendidikan dipahami sebagai jalan untuk meningkatkan kehidupan secara berkelanjutan.

Di pihak lain, dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan industri dan teknologi. Perubahan struktur ekonomi menuju digitalisasi dan otomasi memerlukan keterampilan baru seperti literasi data, kreativitas, komunikasi, penyelesaian masalah, dan pemikiran kritis. Pendidikan yang statis dan tidak adaptif akan menghasilkan lulusan yang sulit masuk pasar kerja modern, sehingga berdampak pada stagnasi mobilitas sosial. Oleh karena itu, kualitas pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga relevansi kurikulum, efektivitas pembelajaran, serta kesiapan siswa menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial.

Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial memiliki dimensi yang rumit. Pendidikan dapat berfungsi sebagai jembatan untuk perbaikan kualitas hidup, namun dampaknya sangat tergantung pada kesetaraan akses, pemerataan mutu, efektivitas kebijakan, kesiapan tenaga pendidik, serta dukungan lingkungan sosial. Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang memberikan kesempatan kepada sekolah, tetapi memastikan semua siswa memperoleh kualitas pembelajaran yang sama untuk mencapai potensi maksimal. Di Indonesia, upaya pemerataan pendidikan telah menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan berbagai jurang yang perlu diatasi dengan pendekatan yang menyeluruh, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan variabel strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Upaya transformasi pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat dasar pemerataan akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, integrasi teknologi, serta pembentukan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban formal, melainkan alat nyata untuk mendorong mobilitas sosial, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kebijakan peran pendidikan dalam perluasan mobilitas sosial melalui penguatan kesetaraan akses dan dukungan pembelajaran di Indonesia dengan menggunakan data dan literatur ilmiah terkini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, terutama dalam memahami sejauh mana pendidikan dapat menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran kebijakan pendidikan dalam memperluas mobilitas sosial masyarakat melalui pemerataan akses dan penguatan dukungan pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami kebijakan pendidikan sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh konteks institusional, sosial, dan struktural. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif relevan untuk mengkaji proses, makna, dan dinamika kebijakan publik dalam konteks yang luas, sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln yang menempatkan kebijakan sebagai praktik sosial yang sarat makna.

Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan pemerataan akses pendidikan, termasuk pembangunan sarana pendidikan, bantuan pendidikan, dan beasiswa afirmasi, serta kebijakan dukungan pembelajaran yang mencakup redistribusi dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan fasilitas belajar, dan digitalisasi pendidikan. Seluruh kebijakan tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap peluang mobilitas sosial masyarakat, terutama bagi kelompok sosial-ekonomi rendah dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Data penelitian bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai dokumen tertulis yang kredibel dan relevan. Sumber data meliputi dokumen kebijakan pendidikan nasional, laporan resmi lembaga nasional dan internasional seperti BPS, Kemdikbudristek, UNESCO, OECD, dan ADB, artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional dalam sepuluh tahun terakhir, serta pemberitaan media nasional yang kredibel terkait implementasi kebijakan pendidikan. Pemanfaatan data sekunder dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis kebijakan dan evaluasi konseptual, bukan pada pengukuran perilaku individual.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (document analysis), yaitu teknik sistematis untuk menelaah dan menafsirkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Bowen serta O'Leary (2021) menegaskan bahwa analisis dokumen efektif untuk mengungkap pola, logika, dan arah kebijakan melalui pembacaan kritis terhadap berbagai sumber yang saling terkait. Dokumen dipilih berdasarkan kriteria relevansi tema, kredibilitas institusi penerbit, dan keterkinian informasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik. Tahap analisis meliputi pengorganisasian dokumen berdasarkan tema utama, pengkodean terhadap konsep dan narasi kunci yang berulang, pengelompokan kode ke dalam tema besar seperti kesetaraan akses, kualitas pembelajaran, dan dampak sosial-ekonomi, serta interpretasi hubungan antartema untuk

memahami kontribusi kebijakan pendidikan terhadap mobilitas sosial. Analisis tematik digunakan karena kemampuannya dalam menangkap pola makna dan hubungan konseptual secara sistematis dalam data kualitatif (Nowell et al., 2017).

Keabsahan dan kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen pemerintah, publikasi ilmiah, dan media nasional guna memastikan konsistensi temuan. Selain itu, penelitian ini menerapkan audit trail berupa pencatatan sistematis seluruh tahapan penelitian, mulai dari pemilihan dokumen hingga penarikan kesimpulan. Menurut Castleberry dan Nolen (2018), audit trail merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas analisis.

Melalui desain penelitian ini, penelitian mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pemerataan pendidikan, penguatan kapasitas pendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pembangunan infrastruktur pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan peluang mobilitas sosial masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan analisis dokumen dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih menekankan pada pemahaman kebijakan dan implikasi konseptualnya terhadap mobilitas sosial, bukan pada pengalaman empiris individual masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji peran kebijakan pendidikan dalam memajukan mobilitas sosial masyarakat dengan memperkuat akses yang setara dan menyediakan dukungan pembelajaran. Melalui integrasi analisis dokumen resmi pemerintah, laporan dari lembaga nasional dan internasional, tulisan akademik, serta berita daring, studi ini menghasilkan wawasan komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan diterapkan untuk mendukung pergerakan sosial. Temuan-temuan berikut dikategorikan berdasarkan tema utama, lalu dianalisis secara mendalam untuk mengungkap hubungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan dampaknya pada masyarakat.

Akses pendidikan yang setara menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Pemerintah berusaha mengatasi kesenjangan geografis dan ekonomi yang selama ini menjadi rintangan besar bagi pemerataan pendidikan. Pembangunan dan perbaikan sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi disparitas tersebut. Menurut laporan Kemendikbud

(2020), jumlah sekolah meningkat sebesar 18% dalam lima tahun terakhir. Upaya ini sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik (2023) yang mencatat adanya peningkatan angka partisipasi sekolah di wilayah tertinggal, meskipun kesenjangan kualitas antardaerah masih terlihat. Pada tingkat global, OECD (2018) menegaskan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan dan peluang mobilitas sosial. Peningkatan ini tidak hanya mencakup penambahan bangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas fasilitas, seperti ruang kelas yang memadai, peralatan pembelajaran, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Ketersediaan sekolah yang lebih merata telah memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh atau bahkan tidak bisa bersekolah. Saat ini, siswa di daerah terisolasi memiliki peluang belajar yang sebanding dengan siswa di kota. Dengan demikian, pembangunan sekolah menjadi fondasi awal untuk menciptakan titik awal yang sama bagi semua peserta didik, tanpa memandang lokasi tempat tinggal atau status sosial-ekonomi keluarga.

Selain aspek fisik, pemerintah memperkuat kesetaraan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini memungkinkan siswa memenuhi keperluan belajar seperti buku, seragam, alat tulis, dan biaya tambahan lainnya. Berdasarkan data Kemendikbudristek (2023), bahwa lebih dari 18 juta siswa telah mendapat manfaat dari KIP, yang langsung berkontribusi pada peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah, khususnya di daerah miskin dan tertinggal. KIP membuktikan bahwa pemerataan akses tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga kemampuan siswa untuk tetap bersekolah tanpa hambatan finansial.

Pemerintah juga memperluas program beasiswa afirmasi, seperti Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (BAPM) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (BAPT). Program ini menargetkan siswa dari keluarga kurang beruntung, terutama di wilayah 3T, yang memiliki potensi akademik tetapi terhambat oleh keterbatasan finansial atau sosial. Beasiswa afirmasi ini tidak hanya menutupi biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan bimbingan akademik dan layanan konseling untuk memastikan penerima beasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik. Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperluas akses fisik, tetapi juga memperhatikan kelangsungan dan mutu pembelajaran bagi kelompok rentan.

Dukungan pembelajaran merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan

pemerataan pendidikan. Dukungan ini meliputi penyediaan tenaga guru, pengembangan fasilitas pembelajaran, pembaruan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Data UNESCO (2023) menunjukkan peningkatan rasio guru di wilayah 3T dari 1:35 menjadi 1:28. Peningkatan ini mendekati standar nasional dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketidakmerataan distribusi tenaga pendidik.

Tidak hanya meningkatkan jumlah, pemerintah juga memperhatikan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan, seperti Program Guru Penggerak, sertifikasi profesi, dan latihan pembelajaran berbasis digital. Guru yang kompeten memengaruhi mutu proses belajar-mengajar dan secara langsung berkontribusi dalam membangun kemampuan akademik serta karakter siswa. Guru yang terampil juga dapat menerapkan metode pembelajaran inovatif yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Fasilitas pembelajaran yang cukup meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa. Pemerintah telah membangun berbagai sarana seperti laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang praktik vokasi, dan ruang kelas modern yang memenuhi standar nasional. James S. Coleman juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara sumber daya sekolah, kualitas guru, dan dukungan sosial. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya bergantung pada akses fisik, tetapi juga pada kualitas interaksi belajar dan lingkungan pendukung. Temuan mengenai peran guru, fasilitas pembelajaran, dan transformasi digital mencerminkan pentingnya modal sosial dan institusional dalam mendukung mobilitas sosial. Sarana tersebut memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang aplikatif, praktis, dan selaras dengan tuntutan dunia kerja. Di banyak wilayah 3T, fasilitas seperti laboratorium komputer menjadi jembatan bagi siswa untuk mengenal teknologi informasi yang sebelumnya sulit diakses.

Transformasi digital dalam pembelajaran juga memperluas akses ke materi ajar berkualitas. Portal belajar nasional, aplikasi e-learning, televisi edukasi, dan modul pembelajaran berbasis digital telah membantu siswa memperoleh sumber belajar tanpa bergantung pada buku cetak. Tantangan akses internet masih ada di beberapa daerah terpencil, namun pemerintah mengatasinya dengan inovasi seperti modul offline, konten pembelajaran yang dapat diunduh, serta program belajar melalui radio dan televisi. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai alat pendukung penting yang mendorong pemerataan mutu pembelajaran.

Kebijakan pendidikan yang menekankan akses setara dan dukungan pembelajaran memberikan kontribusi besar dalam mendorong mobilitas sosial masyarakat. Dalam kerangka

teori modal manusia (*human capital theory*), pendidikan dipahami sebagai investasi strategis yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu, yang selanjutnya memengaruhi produktivitas serta peluang ekonomi di pasar kerja (Hanushek & Woessmann, 2015). Pendidikan berfungsi sebagai mekanisme peningkatan modal manusia, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memengaruhi peluang ekonomi seseorang. Sejalan dengan itu, studi OECD (2020) menunjukkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi merupakan indikator kunci peningkatan pendapatan antargenerasi, khususnya di negara berkembang.

Penelitian The SMERU Research Institute (2021) mengungkapkan bahwa penerima KIP dan beasiswa afirmasi memiliki peluang 20–30% lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peluang ini sebanding dengan peningkatan kemungkinan mendapatkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang lebih stabil. Dengan demikian, kebijakan pendidikan terbukti sebagai instrumen pemerintah untuk membuka jalan bagi masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

Laporan Asian Development Bank (2018; diperbarui 2022) menegaskan bahwa keterampilan kognitif, sosial, dan teknis yang diperoleh melalui pendidikan formal meningkatkan peluang mobilitas sosial, terutama di bidang pekerjaan berbasis keterampilan. Pendidikan berkualitas memperluas jaringan sosial siswa, meningkatkan kepercayaan diri, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang.

Meskipun kebijakan pendidikan diarahkan untuk pemerataan dan peningkatan mutu, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Pertama, distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata menyebabkan beberapa sekolah di wilayah terpencil masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Hal ini berdampak pada pengalaman belajar yang terbatas bagi siswa.

Kedua, variasi mutu guru antarwilayah menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Kurangnya pelatihan berkelanjutan, beban kerja yang tinggi, serta fasilitas pendidikan yang terbatas menjadi rintangan umum di daerah 3T.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi program pendidikan belum optimal. Ketidakkonsistenan ini membuat penerapan kebijakan bervariasi antarwilayah sehingga tujuan nasional sulit dicapai secara merata.

Keempat, keterbatasan akses teknologi, khususnya internet dan perangkat digital, menghambat keberhasilan transformasi pembelajaran digital. Banyak sekolah di daerah terpencil masih mengandalkan metode pembelajaran tradisional karena infrastruktur

teknologi belum memadai.

Kelima, faktor sosial-ekonomi keluarga tetap menjadi tantangan. Banyak anak dari keluarga miskin harus bekerja membantu orang tua atau menghadapi tekanan finansial lainnya, sehingga menyulitkan mereka untuk fokus pada pendidikan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial sangat bergantung pada mutu pelaksanaan, pemerataan sumber daya, serta dukungan berkelanjutan bagi siswa dan guru.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tergantung pada pelaksanaan menyeluruh, distribusi sumber daya yang adil, dan dukungan terus-menerus bagi siswa dan guru. Ini sejalan dengan kajian UNESCO (2023) dan World Bank (2018) yang menegaskan bahwa ketimpangan fasilitas, kualitas guru, dan kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan faktor utama yang membatasi efektivitas kebijakan pendidikan di negara berkembang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meratakan pendidikan dan memberikan bantuan belajar merupakan elemen paling penting dalam memfasilitasi mobilitas sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Kebijakan tersebut berperan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk menyediakan landasan yang sama bagi semua siswa. Temuan ini sejalan dengan kajian OECD (2020) yang menegaskan bahwa penggabungan antara ekspansi akses pendidikan dan perbaikan kualitas pengajaran memberikan pengaruh paling besar pada kesejahteraan dalam jangka waktu lama. Ini menyiratkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan peluang untuk sekolah, melainkan juga memastikan bahwa proses pendidikan menghasilkan kemampuan yang sesuai untuk masa depan.

Efektivitas dari kebijakan ini menjadi lebih jelas apabila akses pendidikan yang merata disertai dengan peningkatan kualitas pendidik, fasilitas sekolah yang cukup, serta dukungan untuk pembelajaran yang menggunakan teknologi. Tanpa adanya kombinasi elemen-elemen ini, upaya untuk meratakan pendidikan tidak akan mampu menciptakan mobilitas sosial yang bertahan lama.

Kesetaraan dalam akses pendidikan telah terbukti meningkatkan jumlah siswa di daerah 3T yang dapat mengikuti pendidikan formal, baik pada tingkat menengah maupun tinggi. Berbagai inisiatif prioritas pemerintah, seperti pembangunan sekolah baru, penyediaan fasilitas dasar, pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program beasiswa afirmasi,

menjadi pendorong utama untuk menciptakan akses yang lebih merata. Sejalan dengan pandangan Gary S. Becker, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas individu dan memperluas peluang ekonomi. Ketika akses pendidikan dibuka secara merata, individu dari berbagai latar belakang sosial memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas diri dan posisi sosialnya.

Dukungan tersebut tidak hanya menaikkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antar kelompok sosial. Anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, atau komunitas rentan kini memiliki peluang akademik yang lebih besar. Dengan akses yang diperluas, siswa berada pada posisi awal yang sama untuk memasuki jalur mobilitas sosial, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Kesetaraan ini juga memengaruhi perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Semakin banyak keluarga di wilayah tertinggal yang mulai menyadari bahwa pendidikan merupakan jalan menuju ekonomi yang lebih stabil dan peluang pekerjaan yang lebih baik.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa akses pendidikan saja tidak cukup untuk menciptakan pergerakan sosial yang nyata. Bantuan belajar menjadi elemen kritis dalam keberhasilan pendidikan. Bantuan ini mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana belajar yang memadai, pembaruan kurikulum, serta transformasi digital dalam pendidikan. Kualitas guru memiliki dampak langsung terhadap mutu pembelajaran. Guru yang dilatih dengan baik mampu memberikan bimbingan akademik yang efektif, membentuk karakter siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Fasilitas seperti laboratorium sains, perpustakaan, ruang praktik, dan akses teknologi pendidikan juga memperkuat kemampuan siswa, baik dalam bidang akademik maupun keterampilan abad ke-21. Transformasi digital dalam pendidikan memperluas jangkauan materi ajar melalui platform e-learning, video pembelajaran, modul interaktif, dan aplikasi edukasi. Meskipun tantangan akses internet masih ada di beberapa wilayah, inovasi digital tetap menjadi strategi penting untuk mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan mutu belajar siswa. Laporan UNESCO (2023) menekankan bahwa kualitas pembelajaran merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pendidikan, terutama di daerah terpencil.

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, beberapa strategi perbaikan perlu diterapkan. Penambahan Dana dan Sarana Pendidikan Peningkatan anggaran diperlukan untuk memastikan semua sekolah, khususnya di wilayah 3T, memiliki

laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang layak, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Pelatihan Guru Berkelanjutan dan Insentif Guru di wilayah terpencil perlu mendapatkan pelatihan profesional secara rutin serta insentif yang memadai agar mereka memiliki motivasi dan kemampuan optimal dalam mengajar. Rekrutmen guru berkualitas ke daerah terpencil juga harus difasilitasi. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Monitoring yang sistematis penting dilakukan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan target nasional. Evaluasi juga menentukan efektivitas program pendidikan sehingga kebijakan dapat diperbaiki berdasarkan data. Akses Teknologi Digital Penyediaan internet, komputer, tablet, serta platform pembelajaran digital merupakan keharusan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis teknologi (Setyanti et al., 2025). Pendampingan Sosial dan Ekonomi bagi Siswa Miskin; Pendampingan berupa beasiswa tambahan, dukungan psikososial, dan bimbingan belajar dapat mencegah anak dari keluarga rentan terhambat oleh tekanan ekonomi. Strategi-strategi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan, menciptakan kesetaraan yang lebih nyata, dan meningkatkan peluang mobilitas sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Penggalian mendalam proses penelitian dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada analisis tematik, tetapi juga mencakup refleksi intensif tentang bagaimana setiap elemen informasi dalam dokumen saling terhubung dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan mobilitas sosial masyarakat. Dalam metode deskriptif kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, melainkan berusaha menafsirkan realitas sosial sebagaimana tercermin di dalam dokumen-dokumen yang diteliti. Penafsiran ini dilakukan dengan menjadikan kebijakan pendidikan sebagai fondasi transformasi sosial, serta memahami bahwa setiap kebijakan membawa dampak yang bervariasi bagi berbagai kelompok sosial.

Selama tahap analisis, peneliti menemukan bahwa dokumen kebijakan tidak terpisah secara mandiri. Setiap kebijakan umumnya dibuat melalui proses yang panjang, meliputi pengenalan masalah, konsultasi dengan pihak terkait, perencanaan strategi pelaksanaan, penganggaran, dan penilaian. Dalam dokumen-dokumen itu, terlihat bagaimana pemerintah secara bertahap menanggapi kebutuhan masyarakat untuk memperluas jangkauan pendidikan dan meningkatkan kesamaan dalam pembelajaran. Contohnya, laporan resmi yang menyoroti perbedaan pendidikan antara daerah pusat dan daerah terpencil menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sekolah, tetapi juga oleh aspek sosiokultural, ekonomi, dan geografis. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan

harus dirancang secara fleksibel agar dapat mencapai semua lapisan masyarakat.

Peneliti selanjutnya memperhatikan bagaimana dokumen kebijakan mulai bergeser dari fokus pembangunan fisik semata menjadi penekanan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelum era modern, pemerintah Indonesia lebih menitikberatkan pada pembangunan sekolah dan perekrutan guru dalam skala besar. Meskipun langkah itu krusial, kesenjangan dalam kualitas pembelajaran tetap ada karena distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang dan akses sumber daya belajar yang tidak merata. Namun, dalam dokumen terkini, perhatian pemerintah tampak beralih ke peningkatan kemampuan guru, penguatan metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa, dan penggunaan teknologi pendidikan digital. Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin paham bahwa pendidikan bukan hanya alat administratif, tetapi instrumen perubahan yang menentukan jalur mobilitas sosial masyarakat.

Melalui interpretasi mendalam terhadap dokumen, peneliti mengidentifikasi bahwa kesamaan akses menjadi dasar utama untuk menciptakan mobilitas sosial yang lebih adil. Dokumen kebijakan terbaru menegaskan prinsip bahwa pendidikan harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan status sosial, tingkat ekonomi, lokasi, atau latar belakang budaya. Ketika akses pendidikan merata, masyarakat berada di posisi awal yang setara untuk mendapatkan peluang meningkatkan taraf hidup. Namun, peneliti juga menemukan bahwa akses saja tidak cukup untuk mencapai mobilitas sosial yang maksimal. Akses harus didukung oleh bantuan pembelajaran yang memadai, seperti penyediaan beasiswa, subsidi pendidikan, bantuan alat belajar, peningkatan kemampuan guru, serta penguatan sistem penilaian pembelajaran yang mendorong perbaikan kualitas.

Dalam konteks ini, analisis dokumen menjadi sangat krusial. Melalui pembacaan intensif terhadap materi tertulis, peneliti dapat memahami pola berpikir pembuat kebijakan, arah prioritas pendidikan nasional, serta tanggapan kebijakan terhadap berbagai tantangan sosial yang terus berkembang. Saat dokumen dari kementerian dibandingkan dengan data penelitian akademik atau laporan jurnalistik nasional, peneliti dapat menilai apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana. Perbandingan antar dokumen ini memungkinkan pembentukan gambaran yang lebih objektif tentang sejauh mana kebijakan pendidikan benar-benar dapat membuka peluang mobilitas sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan mobilitas sosial dimulai dari pendidikan yang mampu menghasilkan individu dengan kompetensi yang relevan di dunia kerja. Ketika lulusan pendidikan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang

kompetitif, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik meningkat. Peningkatan penghasilan kemudian berdampak pada keluarga yang pada akhirnya menciptakan perubahan sosial dalam skala komunitas. Tidak jarang siswa dari keluarga kurang mampu yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial tidak hanya berhenti pada individu, tetapi berkembang menjadi transformasi budaya di tengah masyarakat. Pendidikan menjadi simbol harapan dan langkah strategis untuk keluar dari kemiskinan struktural.

Perubahan sosial ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan jalur utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan profesional, jaringan sosial baru terbentuk. Jaringan sosial baru ini menjadi modal penting dalam memperkuat peluang di dunia kerja dan bidang ekonomi kreatif. Dalam jangka panjang, perubahan pola pikir tentang pentingnya pendidikan menciptakan siklus positif antar generasi. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendidikan tinggi, dan orang tua menjadi lebih siap mendukung kebutuhan belajar anak meskipun harus berjuang secara ekonomi (Lutfillah et al., 2022).

Lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa transformasi digital dalam pendidikan telah menjadi faktor baru yang sangat menentukan dalam dinamika mobilitas sosial. Ketika pembelajaran berbasis teknologi semakin maju, peserta didik mendapatkan akses materi yang tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Mereka dapat mengikuti kursus online, video edukasi, simulasi belajar, dan aplikasi pembelajaran mandiri (Halim et al., 2024). Fasilitas ini membuka peluang peningkatan kompetensi akademik dan non-akademik tanpa hambatan geografis. Pendidikan tidak lagi bergantung pada keberuntungan berada di sekolah unggulan, melainkan pada kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif. Meskipun masih ada tantangan ketimpangan infrastruktur digital, kehadiran teknologi terbukti menjadi salah satu faktor paling signifikan yang mempercepat mobilitas sosial.

Melalui seluruh proses tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan utama kebijakan pendidikan terletak pada kemampuannya mengubah struktur sosial masyarakat secara bertahap namun pasti. Ketika sistem pendidikan mampu menyediakan dasar yang kokoh bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi, mobilitas sosial menjadi lebih terbuka dan dapat diakses secara merata. Dengan kata lain, pendidikan bukan sekadar kegiatan belajar-mengajar, tetapi instrumen perubahan sosial yang mendorong masyarakat menuju kehidupan yang lebih setara, sejahtera, dan bermartabat.

SIMPULAN

Hasil studi mengungkapkan bahwa strategi pendidikan memprioritaskan kesetaraan akses dan bantuan belajar memainkan peranan krusial dalam meningkatkan mobilitas sosial di tengah masyarakat. Langkah-langkah pemerintah, seperti pengembangan dan perbaikan sekolah di daerah 3T, penyediaan bantuan finansial melalui program Kartu Indonesia Pintar, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, penyediaan sarana pembelajaran, serta modernisasi digital dalam bidang pendidikan, telah efektif menciptakan kesempatan belajar yang lebih adil untuk anak-anak dari keluarga ekonomi rendah dan wilayah terisolasi. Berkat akses pendidikan yang seimbang dan dukungan belajar yang cukup, para siswa memiliki peluang lebih tinggi untuk menempuh jenjang pendidikan lanjutan, membangun kemampuan serta keahlian yang sesuai, dan menaikkan posisi sosial-ekonomi mereka nantinya. Temuan ini sesuai dengan sasaran penelitian, yakni menelaah cara kebijakan pendidikan dapat memperbesar mobilitas sosial melalui kesetaraan dan bantuan belajar, sambil menekankan bahwa penerapan kebijakan yang efisien, menyeluruh, dan berkesinambungan merupakan faktor utama dalam membentuk masyarakat yang lebih egaliter, produktif, dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2018). Education and skills for inclusive growth and sustainable development in Asia. ADB. <https://www.adb.org/publications>
- Asian Development Bank. (2022). Key indicators for Asia and the Pacific: Human capital and labor market mobility. ADB. <https://www.adb.org/publications>
- Ayudhia Nur Luthfia, Nabila Putri Wahiddiyah, Desy Safitri, & Sujarwo Sujarwo. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pendidikan 2023. <https://www.bps.go.id/assets/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>
- Bukodi, E., & Goldthorpe, J. H. (2018). *Social Mobility and Education in Britain: Research, Politics and Policy* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108567404>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164–185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>

- Halim, U., Febrina, D., Agustina, A., Hidayat, N., & Ningsih, W. (2024). Digital Inequality: E-learning Outcomes among Youth in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 2(1), 8–18. <https://doi.org/10.58631/jtus.v2i1.74>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2021). Education and Economic Growth. In E. A. Hanushek & L. Woessmann, *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.651>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607–668. <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Hendrastomo, G. (2023). Tantangan pemerataan pendidikan di era digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Education*, 12(2), 88–101. <https://www.injoe.org/index.php/INJOE/article/view/261>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Capaian akses dan kualitas pendidikan 2024. <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/capaian-2024-kemendikdasmen-akses-pendidikan-kualitas-pendidikan-dan-lingkungan-belajar>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Siaran pers: Kebijakan redistribusi guru ASN. <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/13935-pemerintah-perkuat-kolaborasi-daerah-lewat-kebijakan-redist>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Statistik Program Indonesia Pintar*. https://pip.kemdikbud.go.id/docs/Statistik_PIP.pdf
- Lutfillah, M. M., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 126–143. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i1.465>
- Nasywa, M., Rahmawati, S., & Lestari, A. (2023). Ketimpangan akses pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences*, 6(1), 303–312. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/1453>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- OECD. (2020). *A broken social elevator? How to promote social mobility*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264301085-en>
- OECD. (2018). *Education at a glance 2018: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2018-en>
- O’Leary, Z. (2021). *The essential guide to doing your research project* (4th ed.). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-essential-guide-to-doing-your-research-project/book249577>
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1723–1731. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>
- Setyanti, A. M., Prestianawati, S. A., & Fawwaz, M. (2025). *From Isolation to Inclusion: Does Digital Adoption Enhance Educational Access in Indonesia’s 3T Areas?* *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v5i1.368>
- The SMERU Research Institute. (2021). *Laporan penelitian tentang dampak bantuan pendidikan terhadap keberlanjutan pendidikan dan hasil ketenagakerjaan*. The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id>

- UNESCO. (2023). Global education monitoring report: Quality of learning and teacher distribution in remote regions. UNESCO Publishing. <https://www.unesco.org>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education – A tool on whose terms?* UNESCO. <https://www.unesco.org/gem-report/>
- World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank. <https://www.worldbank.org/>
- Van Deursen, A. J., & Van Dijk, J. A. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375. <https://doi.org/10.1177/1461444818797082>